POSITION OF JOINT PROPERTY IN POLYGAMOUS MARRIAGES REVIEWED IN THE MARRIAGE LAW AND THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW

KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPIIASI HUKUM ISLAM

Okky Faitzal Fiqrie

Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang
Hk20.okkyfiqri@mhs.ubpkarawang.ac.id

Lia Amalia

Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang
lia.amalia@ubpkarawang.ac.id

Muhamad Abas

Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang
muhammad.abas@ubpkarawang.ac.id

Abstract

This research highlights the legal complexity related to the division of joint assets in marriage, both in the context of monogamy and polygamy, with a focus on the provisions of Article 35 paragraph 1 of Law No. 1 of 1974 and Article 65 paragraph (1) point (b) of Law No. 16 2019. Through a normative juridical approach and analytical descriptive methods, this research examines how assets obtained during marriage are recognized as joint assets without considering individual contributions, as well as the implications of the division of assets in polygamous marriages where each wife is entitled to a fair share according to Islamic law. Implementation of this law requires in-depth understanding and consistent enforcement from the relevant parties to ensure justice and harmony within the family.

Keywords: Joint Property, Polygamy, Islamic Law

Abstrak

Penelitian ini menyoroti kompleksitas hukum terkait pembagian harta bersama dalam perkawinan, baik dalam konteks monogami maupun poligami, dengan fokus pada ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 ayat (1) poin (b) Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Melalui pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analitis, penelitian ini mengkaji bagaimana harta yang diperoleh selama perkawinan diakui sebagai harta bersama tanpa memperhatikan kontribusi individu, serta implikasi pembagian harta dalam perkawinan poligami di mana setiap istri berhak atas bagian yang adil sesuai hukum Islam. Implementasi hukum ini memerlukan pemahaman mendalam dan penegakan yang konsisten dari pihak terkait untuk menjamin keadilan dan keharmonisan dalam keluarga.

Kata Kunci: Harta Bersama, Poligami, Hukum Islam

I. PENDAHULUAN

Saat ini ada beberapa gambaran mengenai perkawinan poligami yang menjadi pokok perbincangan terpusat disetiap

keadaan, waktu, dan tempat. Tidak memandang lingkungan manapun baik itu dalam ruang lingkup akademisi, yayasan, panti asuhan, pondok pesantren, atau

Lembaga-lembaga yang berhubungan dengan banyak orang. Pada hakikatnya setiap manusia jika telah melewati masa remaja kemudian manusia berakal sehat, jasmani maupun rohani, manusia akan senantiasa membutuhkan seorang pasangan hidup nantinya. Yang mana pasangan hidup ini yang akan memenuhi setiap kebutuhan hidupnya, baik secara biologis, sandang, pangan, papan dan lainnya, yang bisa mencintai dan dicintai, bisa pula menyayangi dan disayangi, tidak lupa senantiasa memiliki kesepakatan untuk hidup bersama dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana mestinya.¹

Manusia selayaknya sebagai makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan menjalankan kehidupan bersama serta berdampingan dengan manusia yang lainnya, yang selalu ingin bergaul, berkumpul, dan juga berada bersama-sama dengan masyarakat lain disekitarnya. Hal ini menandakan bahwa sebagai makhluk sosial, manusia itu menginginkan bergaul serta berkumpul dengan manusia yang lainnya. Dalam ranah kodrati manusia, ia senantiasa diciptakan secara berpasang-pasangan. Sehingga manusia itu mempunyai dan juga memiliki keinginan untuk berkeluarga melalui sebuah perkawinan. Dalam hal ini, perkawinan adalah berkumpulnya dua insan makhluk sosial yang awal mulanya tidak bersatu dan berdiri sendiri, akan menjadi satu kesatuan

yang lengkap seutuhnya serta layaknya bermitra. Perlu kita ketahui bahwasanya sebuah perkawinan ialah proses dimana manusia membentuk keluarga yang sah antara laki-laki dan perempuan yang pada mulanya tidak bersatu, menjadikan satu kesatuan yang abadi.²

Sedangkan menurut fiqh, disebutkan oleh Soelaiman Rasyid, perkawinan ialah akad yang menghalalkan sebuah pergaulan diantara laki-laki dan perempuan serta membatasi hak dan kewajiban dengan yang bukan mahramnya. Dikarenakan juga sebuah perkawinan merupakan masalah esensial dalam kehidupan makhluk sosial seperti manusia, disamping itu perkawinan layaknya sarana dalam membentuk keluarga, dimana secara kodrati manusia dapat memenuhi kebutuhan seksualnya, yang sebaiknya dalam perkawinan itu tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia sebagai hubungan keperdataan saja melainkan perkawinan itu mengandung unsur sakralitas dimana hubungan manusia itu sendiri dengan Sang Penciptanya. Dalam hal ini pula dapat dibuktikan bahwa semua agama terutama di Indonesia sudah mengatur dalam pelaksanaan sebuah perkawinan sesuai peraturan masing-masing agama.³

Menurut Undang - Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwasanya

² Khoiruddin Nasution, M, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2004, hlm 17

³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Jakarta : Teras, 2011, hlm 29

¹ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hlm 29

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut KUHPerduta pasal 26, perkawinan merupakan suatu persekutuan/perikatan diantara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh Undang-Undang peraturan negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang kekal dan abadi. Dalam pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam), menyatakan bahwa sebuah perkawinan ialah pernikahan, dimana akad yang sangat kuat dan atau miitsaaqon gholidhon dalam mentaati perintah Allah Swt serta melaksanakannya merupakan ibadah.

Dengan adanya suatu perkawinan maka terbentuklah tujuan daripada perkawinan yang memungkinkan dicapainya diantara suami dan istri tersebut saling melengkapi dan juga membantu satu sama lain, supaya dapat mengembangkan pribadi masing-masing serta mencapai kesejahteraan spiritual maupun materil. Dalam segi materil, sebagaimana kita ketahui dalam sebuah perkawinan dari pihak suami atau pun istri masing-masing memiliki harta yang akan dibawa sebelum melaksanakan akad perkawinan nantinya dan yang diperoleh selama perkawinan itu. Meskipun dalam harta bersama tersebut terkadang hanya seorang suami yang mencari nafkah dengan berbagai usahanya, sedangkan seorang istri hanya berada di rumah, tak

melakukan pekerjaan diluar melainkan hanya mengurus rumah tangganya.⁴

Terkait dengan harta bersama, bisa dipergunakan oleh suami maupun istri dalam kepentingan apapun dan juga berapapun jumlah banyak harta yang dikeluarkan asalkan mendapatkan kesepakatan diantara keduanya. Sedangkan yang menjadi syarat kesepakatan keduanya terhadap harta bersama tersebut secara praktis tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi segala peraturan itu akan dikembalikan lagi ke masing-masing suami dan istrinya dalam merumuskan kesepakatan yang ada. Namun bagaimanakah jika permasalahan harta bersama ini dikaitkan dengan adanya perkawinan poligami suami terhadap istri pertama. Sebab dengan berpoligami, berarti suami mempunyai wanita lain dalam belahan hatinya, yang mendapat porsi yang sama dengan istri pertama, atau bahkan suami lebih cenderung pada istri kedua, atau disebabkan beberapa hal yang lainnya.⁵

Dari pernyataan diatas timbul beberapa pertanyaan bahwasanya “bagaimana hukum perkawinan poligami menurut undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam?”. Perkawinan poligami di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua sumber ini memberikan

⁴ Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 130

⁵ Isnaeni Fuad, *Poligami Dengan Aman*, Jombang : Lintas Media, hlm 7

panduan dan batasan mengenai praktik poligami dibolehkan dengan ketentuan untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat (isteri dan anak-anak).⁶ Dalam hukum positif, undang-undang memberi pengakuan secara tegas bahwa suami-istri masing-masing pihak memiliki kecakapan berbuat hukum. Pengaturan harta bersama dalam perkawinan diatur sebagai berikut:

1. Dalam perkawinan monogami, pada dasarnya tidak terjadi pemisahan harta bersama, kecuali apabila ditentukan dalam perjanjian perkawinan.
2. Dalam perkawinan poligami, harta bersama dari masing-masing istri berdiri secara terpisah.

Berdasarkan uraian tersebut perlu diketahui bagaimana hak dan kewajiban harta bersama dari perkawinan poligami yang telah tersusun sesuai judul “Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Pada Perkawinan Poligami Ditinjau Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Komplikasi Hukum Islam”.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam menganalisis pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dari perspektif hukum Islam.

Pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan hukum secara sistematis berdasarkan pada bahan hukum yang ada, seperti peraturan perundang-undangan yang dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

Analisis dilakukan secara deskriptif analitis, di mana peneliti akan mengumpulkan data hukum yang relevan, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun fatwa ulama terkait. Data tersebut kemudian akan dianalisis secara sistematis untuk menjelaskan secara detail mengenai konsep, prinsip, dan prosedur pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pada dasarnya, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan merupakan jalan untuk penyatuan antara dua jiwa (laki-laki dan perempuan) yang sebelumnya hidup sebagai individu, begitu perkawinan sudah dilakukan maka, individu-individu tersebut memikirkan tujuan visi misi dari keluarga secara bersama. Berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu asas perkawinan menurut sistem hukum Indonesia berasaskan monogami artinya seorang pria hanya boleh memiliki seorang

⁶ Septiandani, D & Astanti, D.I, 2021. Konsekuensi Hukum Bagi Suami yang Melaksanakan Poligami yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *Jurnal USM Law 4*, no. 2, (2021), 795-817

isteri, begitu juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

Terhadap asas monogami ini oleh hukum dibuka kekecualian artinya dalam hal-hal yang khusus, berpoligami (beristeri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan) masih diperbolehkan asalkan memenuhi syarat, alasan dan prosedur tertentu. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yang mengatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria mempunyai seorang isteri begitu sebaliknya. Pasal 3 ayat (2) yaitu melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengesahkan dan memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan.⁷

Poligami secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu *Polu* dan *Gamein*. *Polu* berarti banyak, *Gamein* berarti kawin. Jadi poligami berarti perkawinan yang banyak. Pengertian etimologis tersebut dapat dijaarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Artinya isteri-isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya.⁸

Hukum Islam memberikan kebebasan kepada laki-laki (suami) untuk menikah lebih dari seorang, manakala telah terpenuhi syarat keadilan dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas.⁹ Sedangkan Undang-undang perkawinan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, mengatur tentang syarat-syarat dapat beristeri lebih dari seorang (poligami). Suami yang akan mengajukan poligami, wajib mengajukan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (kompetensi relatif pengadilan agama) (Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan). Dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang, apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain perihal di atas, suami dalam mengajukan permohonan kepada pengadilan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan):

- a. Adanya perjanjian dari istri/istri-istri

⁷ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, cet 2, 2015, hlm 11

⁸ [https://www.studocu.com/id/document/universitas-](https://www.studocu.com/id/document/universitas-nasional-pasim/teori-bahasa/bab-poligami/63501757)

nasional-pasim/teori-bahasa/bab-poligami/63501757 (diakses pada tanggal 5 juli 2024)

⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 357

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

Persetujuan istri/istri-istrinya tidak diperlukan jika istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan (Pasal 5 ayat (2) UU Perkawinan).¹⁰

Perkawinan menurut hukum islam ini diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara umum, peraturan mengenai poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pengaturan mengenai syarat-syarat poligami dan pengaturan mengenai proses poligami. Pengaturan tentang poligami dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55 sampai Pasal 59 KHI. (Pasal 55 KHI) menyatakan bahwa beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai 4 (empat) orang istri. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil

terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Menurut KHI, suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Jika Perkawinan berikutnya dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 56 KHI).

Sama seperti dikatakan dalam UU perkawinan menurut Pasal 57 KHI, pengadilan agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristreri lebih dari seorang jika:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 58:

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan isteri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada

¹⁰

<https://media.neliti.com/media/publications/35644-ID-kepastian-hukum-harta-bersama-dalam-perkawinan-poligami-berdasarkan-kompilasi-hu.pdf> (di akses pada tanggal 5 juli 2024)

persetujuan secara tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang pengadilan agama.

3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam 28 perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Pasal 59:

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin beristeri lebih dari seorang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami mengajukan banding atau kasasi.

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan agama telah memberikan izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh pengadilan agama diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

Pengadilan agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin poligami diatas dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam KHI dikenal dengan istilah Sakinah, Mawadah, Rahmah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apabila ketiga alasan yang disebutkan diatas menimpa suami isteri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia.

¹¹

Sehingga bagi isteri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. Pengadilan dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Pada sisi lain peranan Pengadilan Agama untuk mengabsahkan praktik poligami menjadi sangat menentukan bahkan dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm 47

memiliki otoritas untuk mengizinkan poligami.

Hukum Islam tersebut dilakukan berlandaskan atas pemikiran hukum para ahli hukum Islam tentang perlunya transformasi hukum Islam kedalam hukum positif, sehingga tercipta keseragaman pelaksanaan hukum Islam dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan ummat Islam dalam bidang mua'amalah.¹²

3.2 Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami

Kedudukan harta bersama dalam poligami merupakan akibat hukum dari perkawinan yang dilaksanakan secara poligami, sedangkan pelaksanaan pembagian harta bersama dalam poligami yang diperoleh selama ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama, dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua, apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat. Ketentuan harta bersama tersebut tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap isteri kedua, ketiga, dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah, kendaraan,

pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan isteri kedua, ketiga, dan keempat tidak melebihi 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua, ketiga, dan keempat.¹³

Pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan melalui Pengadilan Agama biasanya terjadi karena tidak adanya titik temu antara para pihak dalam porsi pembagiannya dalam hal perceraian tetapi pembagian harta bersama di pengadilan agama juga dapat terjadi dikarenakan permohonan izin poligami sebagai kepastian hukum atas harta yang diperoleh sebelum suami melakukan poligami dengan isteri pertama maupun kejelasan harta suami dalam harta bersama isteri pertama maupun isteri kedua. Ketentuan mengenai pembagian harta bersama terdapat pada Pasal 65 ayat (1) poin (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa: Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi.

Berdasarkan pasal tersebut berarti harta bersama yang dimiliki isteri pertama dari suami yang berpoligami sebelum perkawinan poligami berlangsung, merupakan hak milik isteri pertama dan menurut Pasal 65 ayat (1) poin (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan:

¹² Mukti Ali Jalil, S. Ag., Mh, *Tinjauan Sosio-Filosofis Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama*, hlm 21

¹³

<http://repo.uinsatu.ac.id/13517/5/BAB%20II.pdf> (di akses pada tanggal 5 juli 2024)

“Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing”. Berdasarkan pasal tersebut, istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta bersama yang dimilikinya bersama dengan suaminya, sedangkan istri kedua dan seterusnya berhak atas harta bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung.

Kompilasi Hukum Islam memberikan aturan yang hampir sama dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Berdasarkan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Dalam perkawinan poligami wujud harta bersama, tidak terpisah antara suami dengan masing-masing isteri. Istri pertama tetap mendapatkan porsi pembagian harta bersama meski suaminya telah menikah untuk yang kedua, ketiga atau keempat kalinya. Mengenai besarnya bagian istri-istri dalam perkawinan poligami Undang-Undang tidak

mengaturnya secara tegas. Hanya ditafsirkan dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami. Maka hak istri atas harta bersama adalah berbanding seimbang dengan suaminya. Bila dipresentasikan maka hak istri dengan hak suami adalah 50% : 50% atau $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$.

Ketentuan di atas dalam praktiknya seperti yang diputuskan dalam Putusan PA Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw yang berada pada kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) yaitu mengabulkan permohonan Pemohon (suami) seluruhnya dengan memberi izin berpoligami kepada Pemohon sekaligus menetapkan bahwa harta-harta adalah sebagai harta bersama selama perkawinan berlangsung yang dialami Pemohon dan Termohon.¹⁴

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991, di dalam Pasal 82 menyatakan bahwa hak istri yang dipoligami adalah mendapatkan tempat tinggal dan biaya hidup secara berimbang dengan istri-istri yang lain. Tempat tinggal sebagaimana dimaksud diatas diperbolehkan suami menempatkan istri-istrinya dalam satu tempat kediaman jika para istri rela dan ikhlas. Kaitannya dengan pembagian harta bersama di atas sebenarnya tidak memenuhi unsur keadilan. Sangat

¹⁴ <https://pa-karawang.go.id/> (di akses pada tanggal 5 juli 2024)

disayangkan dalam pasal tersebut tidak diatur mengenai sanksinya. Sebagai upaya optimalisasi peraturan seharusnya terdapat sanksi yang mengatur secara tegas. Jadi, Penerapan pembagian harta bersama sebagaimana dimaksud di atas adalah jauh lebih adil dari pada pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991.

IV. KESIMPULAN

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan batin dan jasmani antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta membatasi hak dan kewajiban bagi yang bukan mahram. Perkawinan poligami diperbolehkan dalam keadaan tertentu di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun prinsip dasar perkawinan di Indonesia adalah monogami. Poligami diperbolehkan dengan syarat yang ketat untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Pembagian Harta bersama dalam suatu perkawinan diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Segala harta benda yang diperoleh suami istri selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama.

Namun Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara spesifik mengenai mekanisme pembagian harta bersama dalam konteks poligami. Dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam, istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat memiliki hak atas bagian yang adil dari harta bersama. Ketentuan yang diatur dalam pasal 94 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa harta bersama dari suami yang berpoligami harus terpisah dan berdiri sendiri. Dalam hal ini, istri pertama memperoleh hak pada harta bersama yang dimiliki bersama suami sebelum suami tersebut menikahi istri kedua, ketiga, atau keempat. Sedangkan ketika suami menikahi istri kedua, ketiga, atau keempat, maka harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan tersebut harus dihitung dari saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat. Selanjutnya, pembagian harta bersama diatur untuk mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan di antara istri-istri tersebut. Misalnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menetapkan bahwa istri kedua dan seterusnya berhak atas harta bersama sejak perkawinan mereka berlangsung, namun dalam praktiknya, pembagian tersebut haruslah berimbang dan tidak merugikan pihak lain,

sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengatur bahwa keadilan harus ditegakkan dalam segala hal.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010
- Isnaeni Fuad, *Poligami Dengan Aman*, Jombang : Lintas Media
- Khoiruddin Nasution, M, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2004
- Mukti Ali Jalil, *Tinjauan Sosio-Filosofis Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama*
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, cet 2, 2015,
- Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989,
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Jakarta : Teras, 2011
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006

2. Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991

Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan Agama Kab. Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw

3. Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

- Firda, Rakhmayanti. "Pembagian Harta Bersama Pada Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Septiandani, D & Astanti, D.I, 2021. Konsekuensi Hukum Bagi Suami yang Melaksanakan Poligami yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *Jurnal USM Law* 4, no. 2, (2021), 795-817.

4. Website

- <https://www.studocu.com/id/document/universitas-nasional-pasim/teori-bahasa/bab-poligami/63501757> (diakses pada tanggal 5 juli 2024).
- <https://media.neliti.com/media/publications/35644-ID-kepastian-hukum-harta-bersama-dalam-perkawinan-poligami-berdasarkan-kompilasi-hu.pdf> (di akses pada tanggal 5 juli 2024).
- <http://repo.uinsatu.ac.id/13517/5/BAB%20II.pdf> (di akses pada tanggal 5 juli 2024).
- <https://pa-karawang.go.id/> (di akses pada tanggal 5 juli 2024).